

## Menjelajahi Kesenjangan Sosial-Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Masyarakat Suku Akit di Kepulauan Meranti

**Kristina Natalia<sup>1</sup>, Muhammad Ridho Siregar<sup>2</sup>, Fitri Pilami<sup>3</sup>, Martina Apriani  
 Sinaga<sup>4</sup>, Nola Rahma Aulia<sup>5</sup>, Bunga Chintia Utami<sup>6</sup>**

<sup>1,4,5,6</sup>Ekonomi Pembangunan/FEB/Universitas Riau

<sup>2</sup>Agroteknologi/Faperta/Universitas Riau

<sup>3</sup>Administrasi Publik/FISIP/Universitas Riau

Email: kristina.natalia3893@student.unri.ac.id

### **Kata kunci**

Ketimpangan sosial,  
ketimpangan  
ekonomi, Suku Akit,  
Komunitas Adat  
Terpencil, kebijakan  
publik

### **Keywords**

Social inequality,  
economic inequality,  
Akit Tribe, Remote  
Indigenous  
Community, public  
policy

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi kesenjangan sosial dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat Suku Akit di Kepulauan Meranti dan bagaimana implementasi dari kebijakan publik terhadap ketimpangan yang dihadapi Suku Akit sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan in-depth interview kepada key informan secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data yaitu primer dengan wawancara dan data sekunder yang berasal dari data penduduk Desa Tenan dan dinas sosial Kecamatan Tebing Tinggi Barat, buku, dan jurnal. Analisis data diolah menggunakan analisis isi (fokus riset) yang dihubungkan dengan temuan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Suku Akit mengalami kesenjangan sosial dan ekonomi dilihat dari empat aspek yakni tingkat kemiskinan, mata pencaharian, pendidikan, dan akses layanan kesehatan. Sedangkan implementasi dari kebijakan pemberdayaan KAT belum tersosialisasi dengan baik.

### **Abstract**

This research aims to identify the conditions of social and economic inequality experienced by the Akit people in the Meranti Islands and how the implementation of public policy towards the inequality faced by the Akit Tribe as a Remote Indigenous Community (KAT). The research method used is a qualitative method with in-depth interviews to key informants by purposive sampling. Data collection techniques were primary interviews and secondary data derived from data on the population of Tenan Village and the social service office of West Tebing Tinggi Sub-district, books and journals. Data analysis was processed using content analysis (research focus) linked to the findings of the literature study. The results show that the Akit community experiences social and economic inequality seen from four aspects, namely poverty levels, livelihoods, education, and access to health services. Meanwhile, the implementation of the KAT empowerment policy has not been well socialized.

## Pendahuluan

Indonesia mempunyai keberagaman suku, adat, dan budaya yang sangat tinggi. Namun, ketimpangan pembangunan sosial dan ekonomi antar suku atau etnik sering terjadi. Terutama pada suku-suku minoritas seperti pada Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Sosial untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT), KAT merujuk pada kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau terisolasi dan terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan sosial budaya. Kelompok ini sering kali hidup dalam kemiskinan dan rentan terhadap masalah sosial ekonomi, sehingga terjadi disparitas atau kesenjangan. Salah satu kelompok KAT yang mengalami disparitas ini adalah masyarakat Suku Akit yang tinggal di Kepulauan Meranti *Socioeconomic disparities* atau bisa disebut juga sebagai kesenjangan sosial ekonomi yang dialami Suku Akit dapat dimaknai sebagai suatu ketidakseimbangan sosial dimana terdapatnya perbedaan yang amat mencolok (Abdain, 2014). Kesenjangan sosial ekonomi dapat dilihat dari perbedaan berupa kebutuhan primer, seperti tingkat kemiskinan, mata pencaharian, pendidikan, dan akses layanan kesehatan. Keempat indikator tersebut menjadi penentu kesenjangan yang dialami Suku Akit.

Indikator pertama kesenjangan sosial yaitu tingkat kemiskinan. Permasalahan ini telah menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat Akit. Jumlah penduduk miskin di Kepulauan Meranti mencapai 45,25 ribu orang atau sekitar 23,84% dari total (*Badan Pusat Statistik*, 2022a). Data tersebut tidak terlepas dari keberadaan Suku Akit yang tersebar di Kepulauan Meranti dengan tingkat kesejahteraan rendah. Indikator kedua dapat dilihat dari jenis mata pencaharian kebanyakan Suku Akit. Suku Akit cenderung bergantung pada sumber daya alam untuk mata pencaharian mereka, seperti menjadi buruh, nelayan, petani, dan kadang-kadang berburu babi untuk kebutuhan konsumsi. Namun, pendapatan yang mereka peroleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak dapat disimpan untuk masa depan (Saam, 2018).

Indikator penentu ketiga dapat dilihat dari permasalahan pendidikannya. Sebuah studi menunjukkan bahwa dari 75 responden, faktor utama yang menghambat masyarakat Suku Akit untuk melanjutkan pendidikan formal adalah masalah ekonomi orang tua (Khotimah et al., 2017). Indikator keempat dalam hal penggunaan fasilitas, mereka tidak dapat menikmati fasilitas seperti layanan kesehatan yang biasanya tersedia dalam

masyarakat modern. Hal ini terjadi karena masyarakat Akit sangat minim akses terhadap sumber daya finansial yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan penjabaran keempat indikator di atas, pemerintah telah membuat *public policy* (kebijakan publik) yang mengatur pemberdayaan KAT berupa Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil. Pada peraturan ini, KAT dibagi menjadi tiga kategori yaitu kategori I yang hidup berpencar, berpindah antar komunitas kecil, homogen, bersifat tertutup, dan memiliki pekerjaan tergantung alam; kategori II bersifat menetap sementara, masih homogen namun sudah mulai terbuka; kategori III yang sudah mulai maju dan terbuka dibanding dua kategori sebelumnya. Di Kepulauan Meranti, KAT termasuk dalam kategori I, dengan karakteristik yang hidup tersebar dan berpindah-pindah dalam komunitas kecil, homogen, dan tertutup, dengan mata pencaharian yang bergantung pada sumber daya alam lokal (Sidiq, 2020). Meskipun upaya pemberdayaan dilakukan, namun *socioeconomic disparities* yang dihadapi oleh masyarakat Suku Akit masih belum terselesaikan di zaman modern ini.

Hal ini ditunjukkan berdasarkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan Meranti yang rendah, yakni 67,28 dan berada pada posisi paling bawah di antara kabupaten/kota di Provinsi Riau (Badan Pusat Statistik, 2022). Salah satu contoh *socioeconomic disparities* Suku Akit digambarkan di Dusun Bandaraya, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kondisi sosial masyarakat, termasuk Suku Akit sebagian besarnya berpenghasilan sebagai buruh tani atau buruh sagu dengan rata-rata penghasilan 1 juta/bulan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi sekolah yang hanya mencapai tingkat SD (Defit et al., 2019). Ironisnya, meskipun Kepulauan Meranti menjadi salah satu sentra penghasil sagu terbesar di Indonesia dengan luas perkebunan 52.922 hektare dan produksi lebih dari 259 ribu ton per tahun (Wina Hariska Putri, 2022), Suku Akit masih hidup dalam keterbatasan. Potensi besar sagu di Meranti belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, khususnya bagi kelompok rentan seperti Suku Akit.

*Socioeconomic disparities* dan *public policy* yang dialami oleh masyarakat Suku Akit akan mempengaruhi bagaimana upaya pemberdayaan dilakukan dan keberhasilannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Minimnya penelitian terkait kedua hal tersebut pada masyarakat Suku Akit di Kepulauan Meranti

menjadi salah satu pemicu ketidaktepatan sasaran pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana kondisi *socioeconomic disparities* dan implementasi *public policy* yang dirasakan oleh masyarakat Suku Akit Kepulauan Meranti. Data yang diperoleh dari penelitian ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan *public policy* yang lebih efektif untuk masyarakat Suku Akit.

## **Metode**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kondisi kesenjangan sosial dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat Suku Akit serta menilai efektivitas implementasi kebijakan publik mengenai KAT. Lokasi riset dipilih secara sengaja (*purposive*) di Kabupaten Kepulauan Meranti, salah satu daerah persebaran Suku Akit. Populasi penelitian mencakup 133 orang dari seluruh penduduk Suku Akit yang berada di Desa Tenan. Pemilihan Desa Tenan bertujuan untuk memperoleh representasi yang signifikan dari populasi Suku Akit dalam penelitian ini. Desa ini dipilih karena mencerminkan karakteristik pola pikir, budaya, dan gaya hidup Suku Akit secara keseluruhan.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara yang berbeda, di mana metode kuantitatif menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner, sedangkan metode kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*). Sampel untuk penelitian kuantitatif sebanyak 30 orang, sesuai dengan jumlah batas minimal sampel yang disarankan oleh (Cohen et al., 2007). Untuk penelitian kualitatif, sampel dipilih dengan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018). Informan kunci dalam penelitian kualitatif dipilih dengan pertimbangan narasumber mengetahui permasalahan terkait kesenjangan sosial dan ekonomi serta diharapkan mengetahui bagaimana persepsi mengenai *public policy*. Variabel yang akan dikaji terkait kesenjangan sosial ekonomi meliputi pendidikan, kesehatan, akses layanan, dan pendapatan masyarakat Suku Akit. Sedangkan untuk persepsi terhadap *public policy*, fokus penelitian akan berada pada variabel isi kebijakan dan lingkungan implementasi dalam masyarakat Suku Akit.

## Hasil dan Pembahasan

### *Socioeconomic Disparities*

*Socioeconomic disparities* atau bisa disebut sebagai kesenjangan ini dapat dilihat dari perbedaan yang mencakup segala jenis sumber daya berupa kebutuhan primer, seperti tingkat kemiskinan, mata pencaharian, pendidikan, dan akses layanan kesehatan (Abdain, 2014). Dilihat dari keempat faktor yg diteliti yaitu tingkat kemiskinan, mata pencaharian, pendidikan, dan akses layanan kesehatan. Terdapat kesenjangan antara suku Akit dengan masyarakat lainnya. Kesenjangan terjadi bukan karena perbedaan perlakuan kebijakan pemerintah antara suku Akit dan masyarakat lainnya, tetapi karena lebih disebabkan oleh faktor internal.

Umur responden Suku Akit di Desa Tenan dengan kisaran terendah pada umur 19 tahun, dan tertinggi adalah berumur 70 tahun. Dengan rentang umur tersebut, maka dapat dikelompokkan dalam berbagai kelas. Tabel dibawah ini menunjukkan bahwa responden Suku Akit di Desa Tenan sebagian besar berada dalam usia produktif, dengan kelompok umur 30-34 tahun mendominasi pada persentase 20 persen. Dengan usia produktif ini, diasumsikan mereka masih memiliki tenaga yang cukup kuat untuk bekerja atau mengurus rumah tangga. Adapun rentang usia Suku Akit Desa Tenan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Distribusi Umur Responden

| No.          | Rentang Umur<br>(Tahun) | Jumlah<br>Responden | Persentase<br>(%) |
|--------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 1.           | 15-19 tahun             | 1                   | 3,33%             |
| 2.           | 20-24 tahun             | 5                   | 16,67%            |
| 3.           | 25-29 tahun             | 3                   | 10%               |
| 4.           | 30-34 tahun             | 6                   | 20%               |
| 5.           | 35-39 tahun             | 3                   | 10%               |
| 6.           | 40-44 tahun             | 2                   | 6,66%             |
| 7.           | 45-49 tahun             | 2                   | 6,67%             |
| 8.           | 50-54 tahun             | 5                   | 16,67%            |
| 9.           | 55-59 tahun             | 0                   | 0                 |
| 10.          | 60-64 tahun             | 2                   | 6,67%             |
| 11.          | 64-69 tahun             | 0                   | 0                 |
| 12.          | 70-74 tahun             | 1                   | 3,33%             |
| <b>Total</b> |                         | 30                  | 100,00%           |

Sumber: Data Olahan, 2024

### **Tingkat Kemiskinan**

Kemiskinan adalah kondisi dimana individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara fisik seperti pangan, sandang, dan tempat

tinggal, serta kebutuhan non-fisik seperti kesehatan, pendidikan, dan rasa aman (Alawiyah & Setiawan, 2021). Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci, masyarakat Suku Akit di Desa Tenan mengalami beberapa bentuk kemiskinan. Pertama, terlihat dari infrastruktur rumah mereka yang masih sederhana dengan atap rumbia dan sanitasi yang kurang memadai. Kedua, mereka juga mengalami kemiskinan dalam akses terhadap sumber daya alam, dimana sebagian besar tidak memiliki kepemilikan lahan dan bergantung pada pekerjaan sebagai penebang sagu atau petani karet di lahan milik orang lain. Adapun sebagian dari mereka dapat menggunakan lahan yang dimiliki oleh orang lain tanpa membayar, namun tetap harus membagi hasil dengan pemilik lahan tersebut.

Mayoritas Suku Akit cenderung bertahan dengan kondisi mereka saat ini tanpa menginginkan perubahan dalam mata pencaharian, pendidikan, atau kesehatan. Pendapatan yang mereka peroleh sering kali tidak dikelola dengan baik dan habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk konsumsi. Berdasarkan data dari 30 sampel, ditemukan bahwa 17 orang sangat tidak setuju memiliki tabungan untuk masa depan atau situasi darurat, 10 orang tidak setuju, 2 orang setuju, dan hanya 1 orang yang sangat setuju tentang pentingnya kepemilikan tabungan untuk masa depan atau situasi darurat. Adapun tabel persetujuan Suku Akit mengenai tabungan untuk masa depan atau situasi darurat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Tingkat Kesetujuan Suku Akit terhadap Kepemilikan Tabungan untuk Masa Depan atau Situasi Darurat

| Pertanyaan                                              | Keterangan          | Jumlah Responden | Persentase (%) |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|
| Memiliki tabungan untuk masa depan atau situasi darurat | Sangat tidak setuju | 17               | 56,67%         |
|                                                         | Tidak setuju        | 10               | 33,33%         |
|                                                         | Setuju              | 2                | 6,67%          |
|                                                         | Sangat setuju       | 1                | 3,33%          |
| <b>Total</b>                                            |                     | 30               | 100%           |

Sumber: Data olahan, 2024

Kecenderungan rendahnya tingkat kepemilikan tabungan ini berkaitan langsung dengan pendapatan yang terbatas serta rendahnya literasi keuangan di kalangan Suku Akit. Hal ini sesuai dengan temuan Tantia *et al.*, (2014), yang menyatakan bahwa individu dengan pendapatan rendah menghadapi tantangan besar dalam menabung. Salah satu penyebab utamanya adalah tekanan finansial yang mengurangi kapasitas mental untuk membuat keputusan keuangan yang baik. Fokus utama mereka lebih tertuju pada pemenuhan kebutuhan harian, sehingga menabung untuk

masa depan sering kali terabaikan. Kesulitan ini semakin diperburuk oleh minimnya fleksibilitas dalam anggaran mereka, yang memperburuk kemampuan mereka dalam mengelola keuangan secara keseluruhan.

### **Mata Pencanharian**

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci, terlihat bahwa Suku Akit di Desa Tenan menggantungkan hidup pada beberapa jenis mata pencaharian. Dari 30 responden yang di survei, sebanyak 24 responden bekerja sebagai penoreh karet, nelayan, atau penggolek sagu. Selain itu, 5 responden lainnya tidak bekerja dan bergantung pada penghidupan suami mereka, yang mayoritas juga bekerja dalam jenis pekerjaan yang sama dengan sebelumnya. Hanya 1 responden yang tercatat sebagai wirausaha. Detail distribusi pekerjaan Suku Akit dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Distribusi Pekerjaan Responden Suku Akit

| <b>Jenis Pekerjaan</b>                                    | <b>Jumlah Responden</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Wirausaha                                                 | 1                       |
| Tidak Bekerja                                             | 5                       |
| Lainnya (Penoreh karet, penggolek sagu, nelayan, lainnya) | 24                      |
| <b>Total</b>                                              | <b>30</b>               |

Sumber: Data olahan, 2024

Masyarakat Suku Akit yang bekerja sebagai penebang atau penggolek sagu rata-rata menghasilkan pendapatan sekitar 2,5 juta rupiah per bulan. Mereka yang menoreh getah karet di lahan orang lain biasanya mendapatkan pendapatan sekitar 300-400 ribu rupiah per minggu setelah dikurangi biaya obat dan vitamin karet serta pembagian hasil dengan pemilik lahan. Sedangkan para nelayan mencari udang, loka, ikan, dan siput/kerang dengan penghasilan harian bervariasi antara 30-100 ribu rupiah. Hal ini sejalan dengan informasi dari *key informant* yang menyebutkan bahwa Suku Akit memiliki penghasilan rata-rata dibawah 1 juta hingga 2,5 juta rupiah per bulannya, namun banyak juga masyarakat Suku Akit yang berpenghasilan sebanyak kurang dari 1 juta rupiah perbulannya. Diantara mereka juga terdapat beberapa orang yang memiliki penghasilan lebih dari 2,5 juta per bulannya. Adapun distribusi pendapatan responden Suku Akit dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Distribusi Pendapatan Responden Suku Akit

| <b>Distribusi Pendapatan</b> | <b>Jumlah Responden</b> |
|------------------------------|-------------------------|
| <1.000.000                   | 10                      |
| 1.000.000 – 2.500.000        | 16                      |
| 2.500.001-5.000.000          | 3                       |
| >5.000.000                   | 1                       |
| Total                        | 30                      |

Sumber: Data olahan, 2024

Meskipun beberapa Suku Akit memiliki sumber penghasilan yang cukup dan hampir setara dengan suku lainnya di daerah tersebut, namun mayoritas dari mereka menghadapi kesulitan dalam mengelola keuangan sehingga pendapatan mereka sering habis untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan penelitian Yushita (2017) bahwa kesulitan finansial tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan saja, tetapi juga dapat timbul akibat kesalahan dalam manajemen keuangan, seperti kurangnya perencanaan keuangan.

### **Pendidikan**

Kemiskinan seringkali dicirikan dengan pendidikan yang rendah, yang dapat memicu lingkaran setan. Pendidikan yang terbatas berdampak pada peluang kerja yang terbatas, pendapatan yang rendah, serta kesulitan dalam membiayai pendidikan dan akan terus berulang secara terus-menerus. Contohnya terlihat pada tingkat pendidikan yang masih rendah di kalangan Suku Akit. Hasil wawancara mendalam dengan Kepala Suku Akit Desa Tenan dan lima informan kunci dari Suku Akit menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka tidak bersekolah atau putus sekolah saat Sekolah Dasar (SD). Hal ini disebabkan oleh keterbatasan biaya, bantuan pendidikan yang tidak jelas di masa lalu, dan jarak yang jauh antara SMP dan SMA yang hanya tersedia di desa tetangga.

Saat ini, meskipun pemerintah telah menyediakan pendidikan gratis dan akses Sekolah Dasar (SD) yang berada di tengah wilayah, masih banyak anak-anak Suku Akit yang tidak bersekolah atau putus sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD 8 Desa Tenan, terdapat dua faktor utama yang menyebabkan hal ini terjadi, yakni tradisi dan ekonomi. Pertama, faktor tradisi di mana orang tua Suku Akit yang tidak

mendapatkan pendidikan cenderung memperlakukan anak-anak mereka sama seperti mereka dahulu, yaitu tidak ketat dan tidak memaksakan anak untuk mengenyam pendidikan. Hal ini menyebabkan anak-anak mereka memilih untuk tidak bersekolah karena pengaruh lingkungan dan kebiasaan. Kedua, faktor ekonomi di mana banyak orang tua dari Suku Akit mengajak anak-anak mereka yang berusia 9 hingga 10 tahun ke atas untuk bekerja.

Hasil data dari 30 sampel menunjukkan bahwa terdapat 15 responden yang tidak bersekolah, 8 responden tidak menyelesaikan jenjang SD, 6 responden menyelesaikan jenjang SD, dan hanya satu orang yang menyelesaikan jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Detail distribusi tingkat pendidikan Suku Akit dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini. Saat ini, ada 18 anak Suku Akit dari total 66 siswa di SDN 8 Tenan yang menempuh pendidikan dasar. Hanya satu orang dari Suku Akit di Desa Tenan yang berhasil lulus dari perguruan tinggi, berkat bantuan beasiswa dari pihak Agama Budha.

Tabel 5. Distribusi Tingkat Pendidikan Responden Suku Akit

| <b>Klasifikasi</b> | <b>Jumlah Responden</b> |
|--------------------|-------------------------|
| Tidak Sekolah      | 15                      |
| Tidak Tamat SD     | 8                       |
| Tamat SD           | 6                       |
| Tamat SMP          | 0                       |
| Tamat SMK/SMA      | 1                       |
| S1                 | 0                       |
| <b>Total</b>       | <b>30</b>               |

Sumber: Data olahan, 2024

Salah satu penyebab kesulitan Suku Akit dalam bekerja di sektor-sektor lain seperti perkantoran, sektor swasta, maupun pemerintahan adalah karena rendahnya tingkat pendidikan mereka. Suku Akit kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik karena kurangnya pendidikan mereka. Hal ini sejalan dengan penelitian Zacky dan Sholihah (2023) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berbanding lurus dengan kesempatan berkarir yang lebih baik. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak.

### **Akses Layanan Kesehatan**

Berdasarkan wawancara mendalam dengan pihak kesehatan Desa Tenan, yakni Pondok Bersalin Desa (Polindes), Suku Akit mulai peduli dengan kesehatan mereka. Hal ini terlihat dari partisipasi mereka yang rajin dalam Posyandu Balita, Posyandu Penyakit

Tidak Menular (PTM), dan Posyandu Lansia, didorong oleh kader-kader posyandu yang secara rutin mengingatkan dan mengajak mereka untuk datang mengecek kesehatan. Tidak ada disparitas yang signifikan antara Suku Akit dan lainnya dalam hal kesehatan. Semua mendapatkan akses yang sama dan tidak ada masalah kesehatan mencolok sejauh ini. Meskipun mereka tidak memiliki kartu Jaminan Kesehatan atau BPJS, mereka tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan di puskesmas, termasuk persalinan gratis dan layanan untuk lansia.

Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai kebersihan dari Suku Akit. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa Suku Akit menggunakan air gambut tanpa proses penjernihan untuk kebutuhan sehari-hari, baik sebagai air minum maupun untuk mandi. Selain itu, berdasarkan hasil observasi dapat dilihat bahwa beberapa dari mereka masih memiliki sanitasi yang kurang memadai. Detail bentuk sanitasi Suku Akit dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam kesadaran dan fasilitas sanitasi di kalangan Suku Akit, yang dapat berdampak pada kesehatan mereka. Salah satu penyakit yang bisa muncul akibat sanitasi yang buruk adalah stunting. Hal ini sesuai dengan penelitian Khoirun Nisa dan Sukei (2022) yang mengatakan bahwa kondisi hygiene dan sanitasi lingkungan secara tidak langsung dapat mempengaruhi kejadian stunting. Faktor-faktor seperti sumber air minum, kualitas fisik air minum, kepemilikan jamban, dan kebiasaan cuci tangan turut berperan dalam hal ini. Lingkungan dengan hygiene sanitasi yang buruk dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit pada balita.

### ***Public Policy***

Salah satu kebijakan publik yang berkaitan dengan pemberdayaan KAT adalah Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT). Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi hak warga negara, khususnya KAT dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, menciptakan sistem sosial yang inklusif, dan membangun kemandirian sebagai warga negara. Pemberdayaan yang dimaksud, menurut Prijono S. Onny dan Pranarka (1996) dalam Salsabila *et al.*, (2022), adalah proses yang bertujuan untuk menjadikan masyarakat lebih berdaya. Proses ini mencakup upaya mendorong atau memotivasi individu agar memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Selain itu, pemberdayaan harus diarahkan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan narasumber yang berjumlah 10 orang yaitu Kepala Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Camat Tebing Tinggi Barat, Kepala Suku Akit, Dinas Sosial Kepulauan Meranti, dan lima orang Suku Akit. Hanya Dinas Sosial Kepulauan Meranti yang mengetahui mengenai *public policy* KAT.

Menurut teori Merilee S. Grindle, keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari dua hal, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Indikator isi kebijakan terkait manfaat menunjukkan bahwa harapan pembuat kebijakan dari *public policy* adalah agar Suku Akit memperoleh pelayanan publik yang sama, tetapi dari sisi indikator derajat perubahan masih belum tercapai. Pembuat kebijakan berharap dengan adanya pelayanan publik berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kependudukan, maka Suku Akit akan mengalami perubahan dalam pola hidup sehat dan ekonomi yang lebih baik. Pelaksanaan program dalam implementasi kebijakan tentang KAT di Kepulauan Meranti telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial setempat, akan tetapi temuan di lapangan yang mengetahui kebijakan tersebut hanya Dinas Sosial itu sendiri. Pemerintah desa dan Suku Akit sendiri tidak mengetahui kebijakan tersebut.

Sedangkan dari segi konteks implementasi, kepentingan aktor pelaksana berupa kepentingan pemerintah desa dan dinas sosial belum tercapai karena kebijakan khusus untuk Suku Akit Desa Tenan saat ini belum ada tetapi masih sebatas perencanaan di tahun 2026. Saat ini, bantuan yang diterima Desa Tenan hanya berasal dari dana desa, tanpa dukungan dari tingkat kecamatan, kabupaten, atau pusat. Bantuan tersebut pun terbatas, seperti dana sebesar 10 juta rupiah untuk acara keagamaan serta material seperti tenda dan kursi, yang kini sudah tidak ada lagi pada tahun 2024. Kepatuhan dan daya tanggap pemerintah desa dan Suku Akit terhadap kebijakan pemberdayaan KAT masih rendah karena ketidaktahuan mereka. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan informasi yang memadai mengenai kebijakan tersebut. Akibatnya, kebijakan yang sudah dirumuskan dengan baik di tingkat pusat tidak dapat diterapkan dengan efektif di tingkat lokal.

## **Simpulan**

Penelitian ini berusaha mengkaji kesenjangan sosial dan ekonomi Suku Akit dengan mencakup empat faktor utama, yaitu tingkat kemiskinan, mata pencaharian,

pendidikan, dan akses layanan kesehatan. Meskipun tidak ada perbedaan perlakuan kebijakan pemerintah antara Suku Akit dan masyarakat lainnya, kesenjangan ini lebih disebabkan oleh faktor internal. Mayoritas Suku Akit hidup dalam kemiskinan dengan pendapatan rendah, pekerjaan sebagai penoreh karet, nelayan, atau penggolek sagu, dan pendidikan yang terbatas. Rendahnya pendidikan berdampak pada peluang kerja yang minim dan menyebabkan produktivitas menjadi rendah. Hal tersebut juga menjadi penyebab rendahnya pendapatan dan rendahnya tabungan Suku Akit. Akses layanan kesehatan mulai membaik, tetapi kesadaran dan fasilitas sanitasi masih menjadi tantangan besar. Keterbelakangan pasar dan manajemen keuangan yang buruk juga memperparah situasi ekonomi mereka, menciptakan lingkaran setan kemiskinan yang sulit diputus.

Menanggapi kesenjangan tersebut, Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT) bertujuan untuk melindungi hak warga negara, khususnya KAT, dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka dan membangun kemandirian. Namun, wawancara dengan berbagai narasumber menunjukkan bahwa hanya Dinas Sosial Kepulauan Meranti yang mengetahui kebijakan ini. Implementasi kebijakan tersebut belum berhasil karena ketidaktahuan pemerintah desa dan Suku Akit, serta kurangnya sosialisasi. Meskipun ada harapan dari kebijakan ini untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan Suku Akit, konteks implementasi belum mendukung, terutama karena keterbatasan bantuan dan perencanaan yang baru akan dimulai pada tahun 2026.

## Referensi

- Abdain, A. (2014). Peran Sistem Ekonomi Islam dalam Menanggulangi Tingkat Kesenjangan Sosial. *Jurnal Muamalah*, IV(2), 15–26.
- Alawiyah, T., & Setiawan, F. (2021). Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Desa. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 15(2), 131–154. <https://doi.org/10.24815/jsu.v15i2.22392>
- Badan Pusat Statistik. (2022).
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education, 6th ed. In *Research methods in education*, 6th ed. Routledge/Taylor & Francis Group.
- Defit, S., Zefriyenni, Novia Dewi, Y., & Yarman. (2019). Effectiveness of the Indonesian literacy school program in improving the quality of basic education for marginal communities in the Indonesian border area. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 314(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/314/1/012043>
- Khoirun Nisa, D. M., & Sukesu, T. W. (2022). Hubungan Antara Kesehatan Lingkungan dengan Kejadian Stunting di Wilayah Puskesmas Kalasan Kabupaten Sleman. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 21(2), 219–224.

- <https://doi.org/10.14710/jkli.21.2.219-224>
- Khotimah, H., Hambali, H., & Supentri, S. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Suku Akit Tidak Melanjutkan Pendidikan Formal di Desa Sokop Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau*, 4(2), 1–15.
- Novi Yushita Amanita. (2017). Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi. *Nominal :Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, VI, 11–26.
- Saam, Z. (2018). *Kehidupan Masyarakat Adat Suku Akit dan Kearifan Lokal Bahtera Alam*.
- Salsabila, Q., Gabriela Purba, & Selvia Evayanti Saragih. (2022). Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 3(3), 132–141. <https://doi.org/10.46730/japs.v3i3.85>
- Sidiq, R. S. S. (2020). Model Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Reformasi*, 10(2), 217–227. <https://doi.org/10.33366/rfr.v>
- Sugiyono, S. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tantia, P., White, S., & Wright, J. (2014). The Assets Perspective: The Rise of Asset Building and its Impact on Social Policy. *Ideas42*, 1–299. <https://doi.org/10.1057/9781137384881>
- Wina Hariska Putri. (2022). Inclusive Governance Pada Pengelolaan Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 3(2), 50–58. <https://doi.org/10.46730/japs.v3i2.81>
- Zacky, M., & Sholihah, R. A. (2023). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kesempatan Berkarir (Studi Kasus Pada Masyarakat Kabupaten Batang). *Jurnal Sahmiyya*, 2(1), 1–6.